



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI RAHAYU
2. Jabatan : KEPALA SEKOLAH
3. NHK : 550858

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 695.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m²/105 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m²/81 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA SV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 50CT135HC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 160 ABS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.121.244

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 829.121.244

III. HUTANG Rp. 305.370.140

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 523.751.104

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.